



Keterbukaan Perdagangan di 6 Negara ASEAN : Peran *Foreign Direct Investment*, Pengeluaran Pemerintah, dan Inflasi

Wayan Dea Maharani Ardiana^{1*}, Anak Agung Bagus Putu Widanta²

¹⁻²Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Udayana, Indonesia

*Penulis Korespondensi : deaardiana2404@gmail.com

Abstract. Trade openness is one of the key indicators reflecting a country's integration into the global economy. During the period 1995 – 2023, the level of the trade openness in six ASEAN countries (Singapore, Brunei Darussalam, Indonesia, Thailand, Cambodia, and Philippines) showed varying patterns. In addition, external factors such as inflows of foreign direct investment (FDI), government expenditure, and inflation are expected to influence trade openness in these countries. This study aims to analyze the effect of influence foreign direct investment, government expenditure, and inflation on trade openness in 6 Countries ASEAN. The variables used in this study include trade openness as the dependent variable, and foreign direct investment, government expenditure, and inflation as the independent variables. The analytical method applied is panel data regression with a quantitative approach, using secondary data obtained from the World Bank. The results show that simultaneously foreign direct investment, government expenditure, and inflation have a significant effect on trade openness. Partially, foreign direct investment and government expenditure have a positive and significant effect, while inflation has a negative and significant effect. The conclusions of this study is that trade openness in 6 Countries ASEAN is strongly influenced by foreign capital inflows and the effectiveness of government expenditure, but it is vulnerable to decline when price instability occurs.

Keywords: 6 Countries ASEAN; Foreign Direct Investment; Government Expenditure; Inflation; Trade Openness.

Abstrak. Keterbukaan perdagangan menjadi salah satu indikator penting dalam menggambarkan integrasi ekonomi suatu negara dengan perekonomian global. Selama periode 1995 – 2023, tingkat keterbukaan perdagangan di enam negara ASEAN (Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Thailand, Kamboja, dan Filipina) menunjukkan pola yang bervariasi. Selain itu, faktor eksternal seperti arus masuk investasi asing langsung (*foreign direct investment*), pengeluaran pemerintah, dan inflasi mempengaruhi keterbukaan perdagangan di negara-negara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *foreign direct investment*, pengeluaran pemerintah, dan inflasi terhadap keterbukaan perdagangan di 6 Negara ASEAN. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi keterbukaan perdagangan sebagai variabel dependen, serta *foreign direct investment*, pengeluaran pemerintah, dan inflasi sebagai variabel independen. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari *World Bank*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan *foreign direct investment*, pengeluaran pemerintah, dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap keterbukaan perdagangan. Secara parsial, *foreign direct investment* dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa keterbukaan perdagangan di 6 Negara ASEAN sangat dipengaruhi oleh masuknya modal asing dan efektivitas pengeluaran pemerintah, namun rentan menurun apabila terjadi ketidakstabilan harga.

Kata kunci: 6 Negara ASEAN; Foreign Direct Investment; Inflasi; Keterbukaan Perdagangan; Pengeluaran Pemerintah.

1. PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan aktivitas pertukaran barang dan jasa antarnegara yang memungkinkan setiap negara memperoleh produk yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri di dalam negeri. Melalui mekanisme ini, negara dapat memperluas pasar, meningkatkan keuntungan, dan mendorong kemajuan masyarakat melalui transfer teknologi yang terus berkembang. Aktivitas ini tidak dapat dipisahkan dari ekspor dan impor sebagai sarana utama pertukaran barang dan jasa. Tingkat ekspor dan impor suatu negara bersifat

fluktuatif karena bergantung pada permintaan domestik dan global serta kesiapan negara dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri. Meski banyak negara terikat perjanjian perdagangan, aktivitas ini tetap menghadapi risiko dan tantangan akibat ketatnya persaingan internasional.

Kerja sama ekonomi ASEAN menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas kawasan dan meningkatkan kesejahteraan melalui berbagai program integrasi perdagangan. Melalui AFTA dan MEA, negara-negara anggota memperoleh peluang untuk memperluas perdagangan, memperkuat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan konektivitas pembangunan. Keterbukaan perdagangan kemudian menjadi indikator utama yang menggambarkan sejauh mana negara terintegrasi dengan perekonomian global, yang diukur melalui rasio ekspor dan impor terhadap PDB. Perbedaan tingkat pendapatan antarnegara ASEAN, mulai dari high income seperti Singapura hingga lower middle income seperti Kamboja, turut memengaruhi tingkat keterbukaan perdagangan mereka. Dinamika ekonomi global, krisis finansial, pandemi, serta keberagaman struktur ekonomi antarnegara menyebabkan fluktuasi keterbukaan perdagangan sepanjang periode 1995–2023.

Terdapat dua sisi dari pengeluaran pemerintah yaitu dapat dilihat dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Dalam sisi permintaan peningkatan pengeluaran pemerintah dapat mendorong permintaan agregat yang lebih tinggi dan hal ini dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan menciptakan peluang kerja yang lebih banyak. Jika dilihat dari sisi penawaran, pengeluaran pemerintah dapat dilihat dalam bentuk investasi pemerintah. Investasi pemerintah dalam infrastruktur dan sumber daya manusia dapat meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing ekonomi secara keseluruhan.

Indonesia mencatat pengeluaran pemerintah sebesar 7,38% pada tahun 1995, mengalami penurunan hingga 5,95% pada tahun 1998 dikarenakan krisis ekonomi Asia, namun terjadi peningkatan kembali pada tahun 2015 sebesar 9,75% sebelum melemah kembali pada tahun 2023 yaitu sebesar 7,45%. Fluktuasi ini menunjukkan keterbatasan fiskal Indonesia dalam menjaga kesinambungan dukungan terhadap perdagangan terbuka. Sementara itu, Thailand memperlihatkan tingkat yang lebih tinggi dan stabil. Pada tahun 1995, pengeluaran pemerintah di negara ini sebesar 11,25% dan terus meningkat hingga 18,24% pada 2021, dan sedikit mengalami penurunan ke 16,62% di tahun 2023. Hal ini menunjukkan komitmen Thailand dalam menggunakan kebijakan fiskal sebagai instrument untuk memperkuat basis ekonomi yang sangat bergantung pada perdagangan internasional.

Kamboja memiliki tingkat pengeluaran pemerintah terendah di kawasan ASEAN yaitu pada tahun 1995 tingkat pengeluaran pemerintah di negara ini hanya 5,84% dan sedikit mengalami peningkatan hingga 6,57% pada tahun 2021 lalu pada tahun 2023 sebesar 6,08%.

Rendahnya pengeluaran pemerintah menandakan keterbatasan kapasitas fiskal untuk mendukung infrastruktur perdagangan. Filipina justru mengalami cukup peningkatan dari 10,89% pada tahun 1995 dan naik konsisten hingga 15,58% pada tahun 2021, lalu mengalami penurunan sedikit hingga 14,22% pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan peran fiskal yang semakin penting dalam menciptakan iklim perdagangan yang lebih terbuka dan produktif.

Selain pengeluaran pemerintah, terdapat indikator lainnya yang berperan dalam mempengaruhi dinamika keterbukaan perdagangan adalah inflasi. Dalam perekonomian terbuka, kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh tingkat output, tetapi juga oleh kestabilan harga. Inflasi yang terlalu tinggi dapat menekan daya beli masyarakat, mengurangi daya saing ekspor, serta meningkatkan biaya impor, sehingga berpotensi mempersempit keterbukaan perdagangan. Sebaliknya, jika inflasi terjaga pada tingkat moderat mampu menciptakan iklim usaha yang stabil, meningkatkan kepercayaan investor, dan mendorong aktivitas perdagangan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa adanya trade-off antara otoritas output dan inflasi, sehingga kebijakan moneter berperan penting dalam menjaga keseimbangan tersebut. Di lain sisi terdapat pula suatu kebijakan otoritas moneter yang memiliki tujuan untuk menstabilkan harga, yaitu : *Inflation Targetting Framework* (ITF) stabilitas inflasi ini penting untuk dilakukan karena berkaitan dengan ekspektasi pemerintah dan juga masyarakat.

Inflasi merupakan sebuah kondisi terjadinya kenaikan harga barang secara umum dan terjadi terus menerus dalam suatu periode. Dikarenakan kenaikan harga itulah barang serta jasa mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan produksi sehingga perekonomian dapat didorong untuk meningkatkan aktivitas produksi nasional. Namun, perlu ditekankan bahwa inflasi dapat mengurangi daya saing suatu negara yang pada akhirnya memengaruhi penurunan ekspor.

Meskipun inflasi bisa membawa dampak negative terhadap perekonomian, inflasi tidak boleh diatasi hingga mencapai nol persen. Jika inflasi diturunkan menjadi nol, hal ini bisa menimbulkan stagnasi dan menghambat seluruh aktivitas ekonomi. kebijakan pemerintah yang tepat sangat penting dalam mengelola perekonomian suatu negara. Idealnya tingkat inflasi sebaiknya berada pda level moderat, yaitu kurang dari 5% (Herman, 2017). Dikarenakan rentang tersebut mampu memberikan kepastian harga bagi pelaku usaha sekaligus menjaga daya saing perdagangan internasional. Inflasi yang stabil akan memperkuat kepercayaan investor, mendorong kelancaran ekspor-impor, serta mempertahankan keterbukaan perdagangan suatu negara dalam jangka panjang. Adanya peningkatan keterbukaan perdagangan dapat

menyebabkan inflasi meningkat satu hingga dua tahun kemudian, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Rangkuti *et al*, 2024).

Indonesia pernah mengalami lonjakan inflasi ekstrim hingga 58,45% pada tahun 1998, akibat dari adanya krisis ekonomi Asia. Thailand di periode yang sama mencatat inflasi sebesar 7,99%. Meski setelah krisis tersebut keduanya mampu menurunkan inflasi ke level yang lebih terkendali, Indonesia masih mencatat cepatan fluktuasi tinggi sebesar 10,45% pada tahun 2005, sedangkan Thailand pada tahun 2023 berada di angka 8,48%. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa bukan hanya besar atau kecil inflasi yang penting tetapi juga kestabilan inflasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis ingin mengetahui bagaimana pengaruh dari foreign direct investment, pengeluaran pemerintah, dan tingkat inflai, dapat mempengaruhi tingkat keterbukaan perdagaan di enam negara ASEAN, yaitu Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Thailand, Kamboja, dan Filipina. Pemilihan keenam negara tersebut didasarkan pada klasifikasi Gross National Income yang dibuat oleh World Bank yang terbagi menjadi tiga kategori yaitu, high middle income (Singapura dan Brunei Darussalam), upper middle income (Indonesia dan Thailand), serta lower middle income (Kamboja dan Filipina). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mempelajari dan menganalisis bagaimana pengaruh dari ketiga faktor tersebut terhadap keterbukaan perdagangan di keenam negara ASEAN tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif untuk menganalisis hubungan Foreign Direct Investment, pengeluaran pemerintah, dan inflasi terhadap keterbukaan perdagangan pada enam negara ASEAN, yaitu Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Thailand, Kamboja, dan Filipina sepanjang periode 1995–2023. Pemilihan negara didasarkan pada klasifikasi pendapatan menurut World Bank tahun 2023 yang membagi kawasan tersebut ke dalam kelompok high income, upper-middle income, dan lower-middle income. Seluruh variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan data sekunder tahunan yang bersumber dari World Bank, mencakup FDI net inflows, government final consumption expenditure, inflation (consumer prices), serta trade openness (% of GDP), sehingga menghasilkan total 672 observasi. (Sugiyono, 2013; World Bank, 2023)

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipan dengan memanfaatkan data sekunder dan literatur yang relevan. Analisis data menggunakan regresi data panel yang menggabungkan dimensi time series dan cross section, dengan tiga kemungkinan model estimasi yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Pemilihan model terbaik dilakukan melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji

Lagrange Multiplier. Setelah model terpilih, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi guna memastikan kelayakan model regresi. (Ghozali, 2013; Gujarati & Porter, 2013)

Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji F untuk mengetahui pengaruh simultan seluruh variabel independen terhadap keterbukaan perdagangan, serta uji t untuk menguji pengaruh parsial masing-masing variabel FDI, pengeluaran pemerintah, dan inflasi. Model regresi yang digunakan mengikuti persamaan dasar panel data dengan koefisien regresi yang mengukur arah dan besaran pengaruh tiap variabel. Hasil analisis diharapkan mampu menggambarkan bagaimana dinamika indikator ekonomi makro berkontribusi terhadap tingkat keterbukaan perdagangan di kawasan ASEAN dalam konteks pengelompokan berdasarkan tingkat pendapatan negara. (Wibisono, 2005; Agus, 2015)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Daerah atau Wilayah Penelitian

Gambaran Umum 6 Negara ASEAN

6 Negara ASEAN yang terdiri dari negara Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Thailand, Kamboja, dan Filipina. Perbedaan karakteristik ekonomi melalui pendapatan dapat membedakan 6 Negara ASEAN melalui klasifikasi GNI. Negara Singapura dan Brunei Darussalam masuk sebagai kategori *high income country* dikarenakan keterbukaan perdagangan di negara Singapura sangat tinggi yang membuat negara ini menjadi pusat perdagangan dan jasa keuangan internasional, sedangkan negara Brunei Darussalam bertumpu pada minyak dan gas sebagai sumber utama perekonomian.

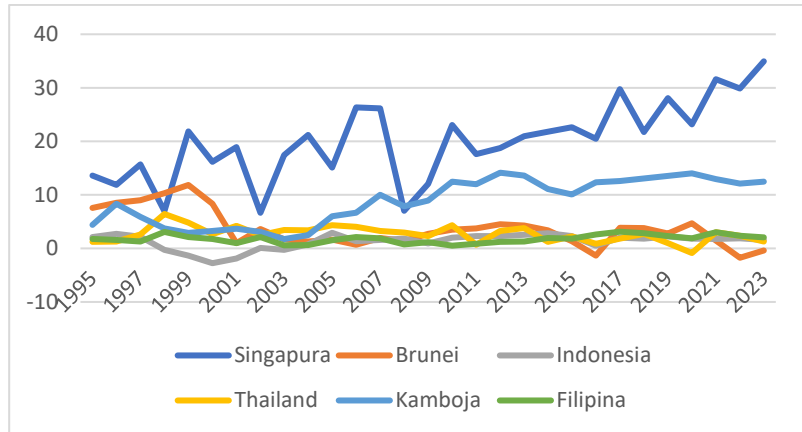
Indonesia dan Thailand mewakili negara *upper middle income* dikarenakan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di ASEAN memiliki struktur ekonomi yang lebih seimbang, sektor konsumsi domestik, sumber daya alam, serta industri manufaktur yang terus berkembang menjadi penopang perekonomian negara ini. Thailand merupakan negara berbasis manufaktur dan ekspor, terutama pada sektor otomotif, elektronik, dan pertanian modern, yang menjadikannya sebagai salah satu penggerak ekonomi ASEAN.

Kamboja dan Filipina merupakan negara yang mewakili *lower middle income* dikarenakan Kamboja termasuk kedalam kategori negara berkembang menunjukkan tingkat keterbukaan perdagangan yang pesat melalui sektor tekstil, pariwisata, dan investasi asing, walaupun masih terdapat tantangan dalam segi infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia. Dilain sisi negara Filipina mengandalkan sektor jasa, termasuk bisnis proses outsourcing (BPO), remitansi tenaga kerja migran, serta pertumbuhan konsumsi domestik sebagai penggerak utama

ekonominya. Dari hal tersebut terlihat bahwa negara Filipina menunjukkan pola keterbukaan perdagangan yang lebih terkait dengan arus modal dan jasa internasional dibandingkan barang.

Deskripsi Hasil Penelitian

Perkembangan *Foreign Direct Investment* di 6 Negara ASEAN

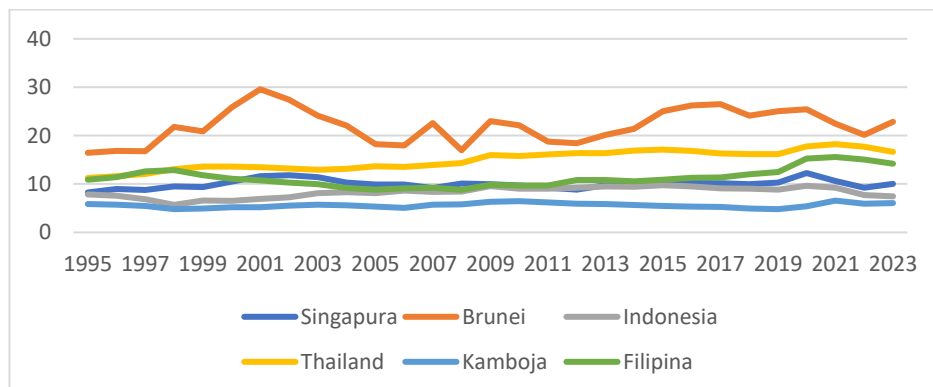


Gambar 1. *Foreign Direct Investment Net Inflows* ASEAN – 6 1995-2023 (%GDP).

Sumber : World Bank Data, 2023 (Data Diolah)

Dalam kawasan ASEAN–6, foreign direct investment berperan penting dalam memperluas keterbukaan perdagangan, terlihat dari Singapura yang mencatat FDI tertinggi pada 2023 sebesar 34,95% berkat stabilitas kebijakan serta kapasitas logistik dan keuangan yang maju. Sementara itu, Thailand, Indonesia, Kamboja, Filipina, dan Brunei Darussalam turut memanfaatkan FDI untuk mendorong ekspor, memperluas sektor manufaktur dan jasa, serta melakukan diversifikasi ekonomi meski tetap menghadapi fluktuasi akibat krisis regional dan global.

Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di ASEAN – 6



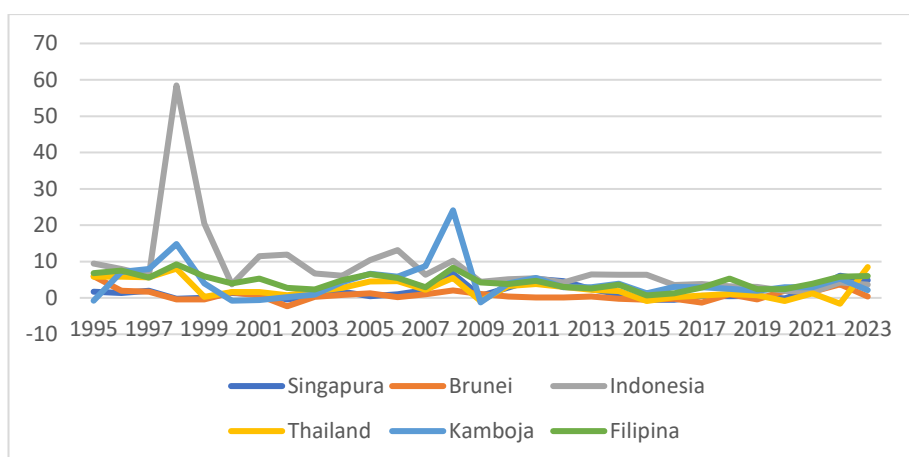
Gambar 2. *Pengeluaran Pemerintah* ASEAN – 6 1995-2023 (%GDP).

Sumber : World Bank Data, 2023 (Data Diolah)

Dalam kawasan ASEAN – 6 pola pengeluaran pemerintah menunjukkan peran strategis dalam mendorong integrasi perdagangan kawasan. Negara Singapura walaupun memiliki porsi belanja pemerintah relatif kecil, akan tetapi tetap fokus pada pengeluaran yang berorientasi pada pengembangan teknologi, logistik, dan jasa keuangan yang dapat memperkuat posisinya sebagai penghubung perdagangan internasional. Dilain sisi Brunei Darussalam lebih mengandalkan pengeluaran pemerintah dari penerimaan migas, namun alokasi tersebut diarahkan untuk diversifikasi sektor non migas yang dapat memperluas basis perdagangan.

Indonesia dan Thailand mengalokasikan pengeluaran pemerintah kedalam pembangunan infrastruktur transportasi, energi, dan Pelabuhan sebagai sarana utama untuk memperlancar arus ekspor dan impor, sehingga dinilai mampu meningkatkan keterhubungan perdagangan internasional. Sementara itu, Kamboja dan Filipina memanfaatkan pengeluaran pemerintah dalam mendorong sektor manufaktur, pertanian, dan jasa berbasis ekspor untuk memperluas akses pasar internasional.

Perkembangan Inflasi di Singapura, Indonesia, dan Kamboja



Gambar 3. Inflasi ASEAN – 6 1995-2023 (%GDP).

Sumber : World Bank Data, 2023 (Data Diolah)

Terlihat pada Gambar 3 bahwa tingkat inflasi di masing-masing negara cenderung menurun setiap tahun, terutama di Singapura dan Brunei Darussalam yang mampu menjaga stabilitas harga berkat sistem moneter yang ketat, keterbukaan perdagangan internasional, serta pendapatan tinggi dari ekspor minyak dan gas. Sementara itu, Indonesia dan Thailand masih menghadapi fluktuasi inflasi akibat dinamika harga energi, pangan, dan kondisi global, sedangkan Kamboja dan Filipina menunjukkan inflasi relatif rendah yang mendukung stabilitas harga, keterbukaan perdagangan, serta iklim kondusif bagi investasi meskipun keduanya berstatus negara *lower middle income*.

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil Uji Analisis Data

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Data Panel Fixed Effect Model.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.842339	0.233936	16.42472	0.0000
FDI	0.065196	0.004395	14.83450	0.0000
LOG_INFLASI	-0.062595	0.031974	-1.957680	0.0521
LOG_PENGELUARAN_PEMERINTAH	0.196691	0.086424	2.275891	0.0243

Sumber : Data diolah dengan *evIEWS* 12, 2025

Berdasarkan hasil regresi diatas, persamaan model untuk persamaan yang menggunakan metode common effect dapat ditulis sebagai berikut :

$$\text{KETERBUKAAN PERDAGANGAN} = 3.842339 + 0.065196 \text{ FDI} + 0.196691 \text{ PENGELUARAN PEM} - 0.062595 \text{ INFLASI}$$

Hasil Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel

Uji Chow

Tabel 2. Hasil Uji Chow.

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	234.335330	(5,144)	0.0000
Cross-section Chi-square	338.480841	5	0.0000

Sumber : Data diolah dengan *evIEWS* 12, 2025

Hasil uji Chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas *Cross-section Chi-square* adalah 0.0000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga H_1 diterima. Oleh karena itu, metode yang tepat untuk penelitian ini dan teknik yang paling baik untuk melanjutkan uji regresi adalah adalah *fixed effect model*.

Uji Hausman

Tabel 3. Hasil Uji Hausman.

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	36.605651	3	0.0000

Sumber : Data diolah dengan *evIEWS* 12, 2025

Uji Hausman telah dilakukan untuk menentukan model data panel yang paling sesuai antara *fixed effect model* (FEM) dan *random effect model* (REM. Dari hasil uji tersebut, diperoleh nilai statistik *Chi-Square* sebesar 36.61 dengan derajat bebas (df) 3 dan nilai

probabilitas 0.0000. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05, maka hipotesis nol (H_0) ditolak. Dengan demikian, model yang tepat digunakan adalah *fixed effect model*.

Berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman menunjukkan bahwa model yang paling tepat dalam penelitian ini adalah *fixed effect model* (FEM). Hasil pemilihan sebagai berikut:

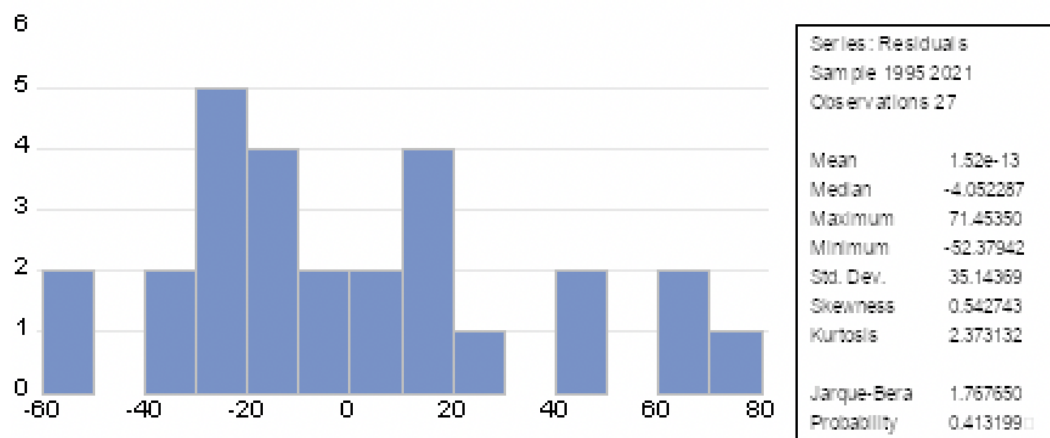
Tabel 4. Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel.

Pengujian	Hipotesis	Keputusan Akhir
Uji Chow	<i>Common Effect Model vs Fixed Effect Model</i>	<i>Fixed Effect Model</i>
Uji Hausman	<i>Fixed Effect Model vs Random Effect Model</i>	<i>Fixed Effect Model</i>

Sumber : Diolah oleh penulis

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Gambar 4. Hasil Uji Normalitas.

Sumber : Data diolah dengan evIEWS 12, 2025

Berdasarkan hasil uji Jarque-Bera, diperoleh nilai probabilitas sebesar $0.413199 > 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa data hasil regresi memiliki distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas.

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	38779.36	889.4214	NA
FDI	0.978340	10.83838	1.034882
LOG_INFLASI	29.61261	1.082633	1.036885
LOG_PENGELUARAN_PEMERINTAH	7629.928	911.6938	1.068816

Sumber : Data diolah dengan eviews 12, 2025

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan nilai Variance Inflation Factor, terlihat bahwa nilai VIF foreign direct investment sebesar $1.034882 < 10.00$, nilai VIF pengeluaran pemerintah sebesar $1.068816 < 10.00$, nilai VIF inflasi sebesar $1.036885 < 10.00$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data per variabel tidak terdapat multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heterokedastisitas

Test	Statistic	Prob.
F-statistic	0.169034	Prob. F(3,25)
Obs*R-squared	0.576544	Prob. Chi-Square(3)
Scaled explained SS	0.584887	Prob. Chi-Square(3)

Sumber : Data diolah dengan eviews 12, 2025

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas dengan metode Glesjer, didapatkan nilai probabilitas F-statistik sebesar 0.9163, Obs*R-squared sebesar 0.9018, dan Scaled Explained SS sebesar 0.8999. Seluruh nilai probabilitas tersebut lebih besar dari taraf signifikansi $\alpha 0.05$. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi tidak mengalami heterokedastisitas. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data bersifat konstan atau tidak terjadi penyimpangan residual.

Uji Autokorelasi

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi.

Test	Statistic	Prob.
F-statistic	1.429680	Prob. F(2,22)
Obs*R-squared	3.335622	Prob. Chi-Square(2)

Sumber : Data diolah dengan eviews 12, 2025

Berdasarkan hasil olahan pada data diatas bahwa uji autokorelasi dengan *Breusch Godfrey* (BG) Test ditemukan nilai Probability chi-square dari Obs*R-squared sebesar $3.335622 \geq 0,05$. maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terjadi autokorelasi.

Uji Hipotesis

Uji Secara Simultan (Uji F)

Tabel 8. Hasil Uji Statistik F.

Statistic	Value
R-squared	0.653288
Adjusted R-squared	0.646307
S.E. of regression	0.379036
Sum squared resid	21.40653
Log likelihood	-66.64186
F-statistic	93.58394
Prob(F-statistic)	0.000000
Mean dependent var	4.656685
S.D. dependent var	0.637334
Akaike info criterion	0.923423
Schwarz criterion	1.002650
Hannan-Quinn crit.	0.955606
Durbin-Watson stat	0.444999

Sumber : Data diolah dengan eviews 12, 2025

a. Rumusan Hipotesis

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, *foreign direct investment*, pengeluaran pemerintah, dan inflasi secara simultan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keterbukaan perdagangan di negara Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Thailand, Kamboja, dan Filipina (Y).

$H_1 : \beta_1 \neq 0$ (i=1,2,3) yang memiliki arti bahwa paling sedikit salah satu diantara *foreign direct investment*, pengeluaran pemerintah, dan inflasi secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap keterbukaan perdagangan di negara Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Thailand, Kamboja, dan Filipina (Y).

b. Tarif Nyata

$$\alpha = 5\% ; df = (k-1) (n-k)$$

$$F_{\text{tabel}} = F_{0,05} ; (k-1) (n-k)$$

$$= F_{0,05} ; (4-1) (168 - 4)$$

$$= F_{0,05 ; 3 ; 164}$$

$$= 2,66$$

c. Kriteria Pengujian

- 1) Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai signifikansi $(\alpha) < 0,05$ maka hipotesis H_0 ditolak dan H_1 diterima.
- 2) Jika nilai $F_{hitung} - F_{tabel}$ atau nilai signifikansi $(\alpha) \geq 0,05$ maka hipotesis H_0 diterima dan H_1 ditolak.

d. Kesimpulan

Dari hasil uji diatas ditemukan bahwa $F_{hitung} (93.58394) > F_{tabel} (2,66)$ dengan probabilitas $0.000000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel *foreign direct investment* (X_1), pengeluaran pemerintah (X_2), dan inflasi (X_3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keterbukaan perdagangan di negara Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Thailand, Kamboja, dan Filipina (Y).

1) Uji Secara Parsial t

Uji t dilakukan dengan tujuan untuk menguji signifikansi hubungan variabel independent (X_1, X_2, X_3) dengan variabel dependent (Y) secara parsial dengan asumsi variabel bebas lain konstan. Pengujian ini diteliti dengan membandingkan t hitung dengan t tabel untuk dapat melihat pengaruh secara parsial dari masing – masing variabel independent dengan variabel dependent dalam penelitian ini. Berikut penjabaran uji t dalam penelitian ini :

a) Rumusan Hipotesis

$H_0 : \beta_1 = 0$, *foreign direct investment* (X_1), pengeluaran pemerintah (X_2), dan inflasi (X_3) secara parsial tidak berpengaruh secara positif terhadap keterbukaan perdagangan di negara Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Thailand, Kamboja, dan Filipina (Y).

$H_1 : \beta_1 > 0$ *foreign direct investment* (X_1), pengeluaran pemerintah (X_2), dan inflasi (X_3) secara parsial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keterbukaan perdagangan di negara Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Thailand, Kamboja, dan Filipina (Y).

b) Tarif Nyata

$\alpha = 5\% = 0.05$ dan $df = (k-1) (n-k) = (168 - 4) = 164$ untuk menentukan nilai t_{tabel} . Nilai t_{tabel} yang dimaksud adalah $t_{\alpha ; (n-k)} = t_{0.05 ; 164} = 1.654$

c) Kriteria Pengujian

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak

d) Menentukan besarnya t_{hitung} **Tabel 9.** Hasil Uji Statistik t.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.842339	0.233936	16.42472	0.0000
FDI	0.065196	0.004395	14.83450	0.0000
LOG_INFLASI	-0.062595	0.031974	-1.957680	0.0521
LOG_PENGELUARAN_PEMERINTAH	0.196691	0.086424	2.275891	0.0243

Sumber : Data diolah dengan *evIEWS 12*, 2025

e) Membuat Kesimpulan

- Hasil uji t terhadap variabel FDI, memperlihatkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 14.83450 lebih besar dari t_{tabel} 1.654 dan hasil signifikansi yang diperoleh sebesar $0.0000 < 0.05$, maka secara parsial FDI berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keterbukaan perdagangan di negara Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Thailand, Kamboja, dan Filipina. Pada variabel FDI menunjukkan nilai koefisien sebesar 0.065196 dengan tanda positif yang menunjukkan bahwa variabel FDI memiliki hubungan yang positif terhadap keterbukaan perdagangan. Dari hal ini terlihat jelas bahwa apabila variabel independent FDI mengalami kenaikan sebesar 1 persen terhadap PDB sementara variabel independent pengeluaran pemerintah dan inflasi bersifat tetap maka variabel keterbukaan perdagangan akan mengalami peningkatan sebesar 0.065196 satuan persen PDB.

Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rejju dan Rana (2025) dengan studi panel lintas negara, didapatkan hasil bahwa variabel *foreign direct investment* berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen keterbukaan perdagangan. Selain itu terdapat pula penelitian mendukung lainnya yang dilakukan oleh Tsaurai (2021) dengan tahun penelitian dari 2000 – 2018 dan sampel ekonomi transisi, dari penelitian ini ditemukan hasil bahwa *foreign direct investment* di negara-negara ekonomi transisi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterbukaan perdagangan.

Temuan ini menjelaskan bahwa peran *foreign direct investment* dalam mengintegrasikan ekonomi ke dalam rantai pasok global, transfer teknologi, dan meningkatkan produktifitas (Rejju dan Rana, 2025). Teori yang sejalan dengan penelitian ini adalah teori Hecksher-Ohlin (H-O), berdasarkan teori ini dijelaskan bahwa perdagangan internasional dipengaruhi oleh perbedaan proporsi faktor produksi (tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam) antar negara. Negara akan cenderung melakukan ekspor barang dengan menggunakan faktor produksi yang relative melimpah dan murah di negara sendiri, dan mengimpor barang menggunakan faktor produksi yang relatif langka. Dalam hal ini *foreign direct investment* berperan sebagai modal yang masuk ke negara dengan memiliki proporsi faktor produksi tertentu yang kemudian akan meningkatkan kapasitas produksi dan mendorong keterbukaan perdagangan dengan negara lain.

- 2) Hasil uji t terhadap variabel pengeluaran pemerintah, memperlihatkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2.275891 lebih besar dari 1.654 dan hasil signifikansi yang diperoleh sebesar $0.0243 < 0.05$, maka secara parsial pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap keterbukaan perdagangan di negara Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Thailand, Kamboja, dan Filipina. Pada variabel pengeluaran pemerintah menunjukan nilai koefisien sebesar 0.196691 dengan tanda positif ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah memiliki hubungan positif dengan keterbukaan perdagangan. Dari hal ini terlihat jelas bahwa apabila variabel independent pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan sebesar 1 persen terhadap PDB sementara variabel independent FDI dan inflasi bersifat tetap maka variabel keterbukaan perdagangan akan mengalami peningkatan sebesar -0.196691 satuan persen PDB.

Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Swee-Hue Kueh, et al (2008) dengan menggunakan 4 negara Asean dan data 1974-2006, ditemukan hasil bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterbukaan perdagangan. Hal ini disebabkan karena peran pemerintah sebagai penanggung resiko yang berguna untuk menanggung resiko eksternal yang muncul diakibatkan adanya tingkat keterbukaan yang tinggi. Dari penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa ketika perdagangan menjadi lebih liberal, maka

pengeluaran pemerintah akan menjadi alat penting dalam mengurangi risiko eksternal dan melindungi industri domestik yang masih baru.

Dari hasil penelitian sejalan dengan teori *Keynesianisme* yang dikembangkan oleh John Maynard dimana teori ini membahas mengenai peran aktif pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah yang diartikan untuk mengatur permintaan agregat agar dapat mencapai stabilitas ekonomi. Dalam keterbukaan perdagangan, peningkatan pengeluaran pemerintah dapat berfungsi sebagai kompensasi terhadap risiko eksternal dari perdagangan internasional.

- 2) Hasil uji t terhadap variabel independent inflasi memperlihatkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar -1.957680 lebih kecil dari 1.654 dan hasil signifikansi yang diperoleh $0.0521 < 0.05$, maka secara parsial inflasi berpengaruh negative dan signifikan keterbukaan perdagangan di negara Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Thailand, Kamboja, dan Filipina. Pada variabel inflasi menunjukkan nilai koefisien sebesar -0.062595 dengan tanda negatif yang menunjukkan bahwa variabel inflasi memiliki hubungan negative terhadap keterbukaan perdagangan. Dari hal ini terlihat jelas bahwa apabila variabel independent inflasi mengalami penurunan sebesar 1 persen terhadap PDB sementara variabel independent FDI dan pengeluaran pemerintah bersifat tetap maka variabel inflasi akan mengalami peningkatan sebesar -0.062595 satuan persen PDB.

Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amrulloh (2023) dengan menganalisis lima negara di kawasan Asean dan menggunakan data panel periode 2002-2021, peneliti menemukan bahwa inflasi berpengaruh negative dan signifikan terhadap keterbukaan perdagangan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan laju inflasi cenderung akan menurunkan aktifitas perdagangan internasional di negara-negara kawasan Asean.

Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan teori inflasi berdasarkan sifatnya yaitu *creeping inflation* dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% per tahun). Inflasi yang berlanjut secara *creeping inflation* dapat mengurangi stabilitas harga dan menciptakan ketidakpastian dalam perdagangan internasional. Ketidakpastian harga membuat investor serta

pelaku perdagangan sulit dalam melakukan kontrak jangka panjang. Akibat dari hal tersebut, keterbukaan perdagangan menurun seiring dengan berkurangnya intensitas ekspor dan impor.

3) Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menilai sejauh mana model regresi mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Nilai koefisiensi ini berada dalam rentang 0 hingga 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin rendah nilai R^2 , semakin terbatas kemampuan variabel independent dalam mempengaruhi atau menjelaskan perubahan variabel dependen. Sebaliknya, nilai R^2 yang mendekati angka satu menunjukkan bahwa sebagian besar variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independent dalam model.

Berdasarkan hasil pengujian, pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai yang didapatkan dari koefisien determinasi R^2 sebesar 0.653288. Nilai tersebut memiliki arti bahwa proporsi pengaruh *foreign direct investment*, pengeluaran pemerintah, dan inflasi terhadap keterbukaan perdagangan sebesar 65.32% sedangkan sisanya 34.68% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada didalam model regresi

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat dibuatkan beberapa kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu sebagai berikut : 1) Berdasarkan hasil pengolahan data dan pengujian secara simultan pada taraf nyata 0,05 menunjukkan bahwa *Foreign Direct Investment*, Pengeluaran Pemerintah, dan Inflasi berpengaruh secara simultan terhadap keterbukaan perdagangan di negara Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Thailand, Kamboja, dan Filipina. 2) Berdasarkan hasil pengolahan data dan pengujian secara parsial *Foreign Direct Investment* dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterbukaan perdagangan di negara Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Thailand, Kamboja, dan Filipina, sedangkan Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keterbukaan perdagangan di negara Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Thailand, Kamboja, dan Filipina.

DAFTAR REFERENSI

- Agbloyor, E. K., Abor, J. Y., Adjasi, C. K. D., & Yawson, A. (2014). Private capital flows and economic growth in Africa: The role of domestic financial markets. *Journal of International Financial Market Institutions and Money*.
- Agus, I., & Herawati, M. (2023). Dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi: Studi kasus di negara ASEAN tahun 2000-2019. Universitas Indraprasta PGRI.
- Ambarsari, I., & Purnomo, D. (2005). Studi tentang penanaman modal asing di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6.
- Amrulloh, R. M. K. (2023). Trade openness studies in ASEAN – 5 and its effect on unemployment. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia*.
- Anshari, M. F., Khila, A. E., & Permata, I. R. (2017). Analisis pengaruh inflasi dan kurs terhadap neraca perdagangan Indonesia tahun 1986–2016. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*.
- Ardiansyah, H. (2017). Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*.
- Arno, A. K. (2015). Kerja sama masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). *Jurnal Muamalah*.
- Asia Development Bank. (2021). *Asian Economic Integration Report 2021: Making Digital Platform Work For Asia And The Pacific*. Asian Development Bank.
- Astot, V., & Sentosa, S. U. (2022). The effect of trade openness, foreign direct investment, government expenditure, labor force, and inflation on economic growth in ASEAN countries. Atlantic Press, Universitas Negeri Padang.
- Boediono. (1999). *Ekonomi internasional*. BPFE.
- Dermawan, W. (2005). *Metode penelitian & analisis data*. Salemba Medika.
- Dinayati, L., Rosnawintang, & Balaka, Y. (2024). Determinants of economic growth in ASEAN-10. *Jurnal Ekonomi*.
- Direktorat Hukum Bank Indonesia. (2009). *Peraturan Bank Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*. Bank Indonesia.
- Dunning, J. H. (1993). *Multinational enterprises and the global economy*. Addison Wesley.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi analisis multivariat dengan program IBM SPSS* (7th ed.). Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2013). *Dasar-dasar ekonometrika* (Basic Econometrics). Salemba Empat.
- Hafizy, M. N., & Sukarniati, L. (2022). Determinasi pertumbuhan ekonomi di 8 negara ASEAN. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Himannudin, F., Marselina, M., Ratih, A., & Murwiati, A. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi produk domestik bruto di Asia Tenggara. *Jurnal Ekonomi Regional*, 15(2), 150–168.
- Hoang, H. (2012). Foreign direct investment in Southeast Asia: Determinants and spatial distribution. *Development and Policies Research Center (DEPOCEN)*, Vietnam.
- Hymer, S. H. (1965). *The international operations of national firms: Study of foreign direct investment*. The MIT Press.

- International Monetary Fund. (2021). *Singapore: Staff concluding statement of the 2021 Article IV mission*.
- Jhingan, M. L. (2013). *Ekonomi pembangunan dan perencanaan*. Rajawali Pers.
- Kirana, D. N., & Ayuningsasi, A. A. K. (2022). Pengaruh remitansi, foreign direct investment, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Krugman, P., & Obstfeld, M. (1999). *Ekonomi internasional: Teori dan kebijakan*. Raja Grafindo Perkasa.
- Kueh, J. S. H., Puah, C. H., & Wong, C. M. (2008). Bounds estimation for trade openness and government expenditure nexus of ASEAN-4 countries. *Department of Economics, Faculty of Economics and Business, University Malaysia Sarawak*.
- Kumari, R., & Sharma, A. K. (2017). Determinants of foreign direct investment in developing countries: A panel data study. *International Journal of Emerging Markets*.
- Kunofiwa, T. (2021). Determinants of trade openness in transitional economies: Does the complementarity between foreign direct investment and human capital development matter? *International Journal of Economics and Business Administration (IJEBA)*.
- Kynes, J. M. (1936). *The general theory of employment, interest, and money*. Palgrave Macmillan.
- Lincoln, A. (2015). *Ekonomi pembangunan* (5th ed.). UPP STIM YKPN.
- Madura, J. (2009). *Manajemen keuangan internasional* (4th ed., Vol. 1). Erlangga.
- Mankiw, G. N. (2005). *Teori makro ekonomi*. Erlangga.
- Manopode, S., Naukoko, A., & Mandei, D. (2019). Analisis pengaruh aliran investasi asing dan perdagangan internasional terhadap produk domestik bruto di Indonesia (2013.I – 2017.IV). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(02), 94–107.
- Nairobi, N., & Amelia, N. (2022). Political stability, index perception of corruption and direct foreign investment in Southeast Asia. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Nopirin. (1999). *Ekonomi internasional*. BPFE.
- Osei, D. B., Sare, Y. A., & Ibrahim, M. (2019). On the determinants of trade openness in low and lower-middle-income countries in Africa: How important is economic growth? *Future Business Journal*.
- Putra, Z. H. (2022). Pengaruh foreign direct investment, pengeluaran pemerintah, angkatan kerja, inflasi, dan trade openness terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN. Universitas Andalas.
- Rana, R. (2025). Determinants of trade openness: A cross-country analysis. *Indian Economic Service Probationary Paper*.
- Rangkuti, S., Rahmi, M., Nuriyo, A. N., & Wahyuni, R. N. T. (2024). Dampak liberalisasi perdagangan terhadap inflasi di Indonesia. *Seminar Nasional Official Statistic 2024*.
- Rantebua, S., Rosnawintang, R., & Suriadi, L. O. (2020). Analisis pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*.

- Rasyid, Z. B. (2023). Pengaruh inflasi, nilai tukar, keterbukaan perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap investasi asing langsung di Indonesia. Universitas Hasanuddin Makasar.
- Rebeka, S., & Ginting, A. (2019). Analisis middle income trap Indonesia dengan Korea Selatan. *Penerbit: Universitas Indonesia*.
- Riyad, M. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di enam negara ASEAN periode 1990-2009. Perpustakaan Universitas Indonesia.
- Salvatore, D. (1997). *Ekonomi internasional* (5th ed.). Erlangga.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2004). *Ilmu makroekonomi* (7th ed.). Media Global Edukasi.
- Sarwedi, S. (2002). Investasi asing langsung di Indonesia dan faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 17–35. Jurusan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra.
- Schumpeter, J. A. (1934). *The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, and the business cycle*. Harvard University Press.
- Sugiyanto, R., Gunarto, T., & Yuliawan, D. (2022). Analisis dampak ekspor dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di 5 negara ASEAN. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sujidno, S., Pamungkas, R. S., & Riyanto, A. (2023). Analisis efektivitas belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan*.
- Suprijono, A. (2015). *Cooperative learning*. Pustaka Belajar.
- Theodoris, D., Setyari, N. P. W., & Aswitari, L. P. (2017). Pengaruh indeks kemudahan berbisnis, foreign direct investment dan populasi penduduk terhadap perekonomian ASEAN. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan ekonomi* (9th ed.). Erlangga.
- Transparency International. (2021). *Corruption perceptions index 2021*.
- UNCTAD. (2019). *World Investment Report 2019: Special Economic Zones*. United Nations Conference on Trade and Development.
- Walimuda, H. (2022). Pengaruh pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran, inflasi, dan foreign direct investment terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi (Studi Kasus 8 Negara ASEAN). Universitas Lampung.
- World Bank. (2023). *World development indicators*.
- World Bank. (2024). *Cambodia can go from spending more to spending better: Public expenditure review*.
- Yuliana, S., Aida, N., & Taher, A. R. (2023). The effect of foreign debt, foreign direct investment, and inflation on economic growth in 7 ASEAN countries for the period 2012–2020. *Al Qalam: International Journal Islamic Education, Research and Multiculturalism*.